



Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019)

Hanifa Zama Dinnata

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: hanifazama@gmail.com

Nuraeni

Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: nuraeni@unpad.ac.id

Dikirim: 4 Februari
2020

Direvisi: 19 Mei 2020

Diterima: 25 September
2020

Dipublikasikan: 30 September
2020

Keywords

ASEAN,
South-South and Triangular Cooperation,
Sustainable Development Goals

ABSTRACT

*South-South and Triangular Cooperation is development cooperation to achieve independent conditions, involving three parties; two Southern countries and a third party, which is a developed country or multilateral organization as a provider of resources and knowledge. This collaboration is considered effective to optimize the world development agenda, one of which is the Sustainable Development Goals. ASEAN, which consists of Southern countries, is an active actor for achieving SDGs but also is considered to have a slow progress. This article aims to identify the South-South and Triangular Cooperation in the Implementation of SDGs by ASEAN, with a time limit of 2015-2019. Using international organization concept, by placing ASEAN as an actor and analyzing the formal analysis according to the book *International Organization* by Clive Archer (2001). The research method used is descriptive qualitative guided by John W. Creswell's book, *Research Design: Qualitative, Quantitative Approaches, and Mixed Methods* (2010). The results found are that the South-South and Triangular Cooperation conducted by ASEAN is still largely at the level of political ideology, namely the values and principles of solidarity between Southern countries, and at a fully technical level of cooperation. There needs to be a more concrete implementation technically by ASEAN.*

Kata Kunci

ASEAN,
Kerjasama Selatan-Selatan dan
Triangular,
Sustainable Development Goals

ABSTRAK

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular merupakan kerjasama dalam bidang pembangunan yang melibatkan negara-negara Selatan dengan tujuan mencapai kondisi yang independen, dengan melibatkan tiga pihak; dua negara Selatan dan pihak ketiga, yaitu negara maju atau organisasi multilateral sebagai penyedia sumber daya maupun pengetahuan. Kerjasama ini dianggap dapat mengoptimalkan agenda pembangunan dunia salah satunya Sustainable Development Goals. Salah satu aktor aktif dalam usaha pencapaian SDGs

adalah ASEAN yang beranggotakan negara-negara Selatan. Namun, perjalanan ASEAN akan SDGs dinilai lambat pada beberapa poin. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi SDGs oleh ASEAN, dengan batasan waktu 2015-2019. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan konsep organisasi internasional, menempatkan ASEAN sebagai aktor dan menganalisis dengan analisa institusi formal menurut buku *International Organizations* oleh Clive Archer (2001). Metode penelitian yang digunakan disini merupakan kualitatif deskriptif yang berpedoman pada pemaparan John W. Creswell dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (2010). Hasil yang ditemukan merupakan bahwa Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular yang dilakukan oleh ASEAN sebagian besar masih berada dalam tataran ideologis politik, yaitu nilai dan prinsip solidaritas antar negara Selatan, dan belum seluruhnya telah menjadi kerja sama teknis. Perlu adanya pelaksanaan yang lebih konkret secara teknis oleh ASEAN.

PENDAHULUAN

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan kerja sama dalam bidang pembangunan yang melibatkan negara-negara Selatan dengan tujuan mencapai kondisi yang independen, dengan dasar solidaritas, kesetaraan dan mutualisme yang dibentuk sejak Konferensi Bandung tahun 1955. Menurut dokumen Nairobi Outcome, Kerja sama Selatan-Selatan merupakan suatu kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara Selatan baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun teknis dengan lingkup bilateral, kawasan, antar-kawasan maupun inter-regional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012).

Dalam perkembangan dinamika pembangunan dunia, terdapat suatu bentuk kerja sama baru yang melibatkan tiga pihak; dua negara Selatan dan pihak ketiga, yaitu negara maju atau organisasi multilateral sebagai penyedia dana ataupun memberikan pelatihan keterampilan, teknologi, sumber daya, maupun pengetahuan. Bentuk kerja sama ini dikenal dengan Kerja sama Triangular. Dengan adanya kerja sama yang lebih kolektif antara negara Utara dan negara Selatan, kerja sama ini dianggap dapat mengoptimalkan agenda pembangunan dunia. Oleh karena itu, terdapat istilah bentuk kerja sama pembangunan baru, yaitu Kerja sama Selatan-

Selatan dan Triangular (KSST). (UNESCAP, 2018)

Bentuk kerja sama KSST juga telah diidentifikasi sebagai modal utama dalam pelaksanaan agenda pembangunan global yang juga berada dibawah pengawasan PBB, yakni Sustainable Development Goals 2030. Begitu diluncarkannya SDGs, dunia memiliki 17 agenda pembangunan yang begitu signifikan bagi negara-negara Selatan, khususnya yang berada di Asia Tenggara. ASEAN, sebagai organisasi regional, begitu berkomitmen dalam mengimplementasikan agenda global tersebut kedalam kerangka pembangunan regionalnya. Pada 2011, terdapat bagian khusus dalam ASEAN Roadmap mengenai penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam bagian C.2.1 untuk meraih MDGs. Roadmap itu juga merekomendasikan ASEAN untuk “memegang peran utama dalam memperkuat kerja sama Selatan-Selatan diantara negara anggota ASEAN dan ASEAN+3 dan/atau negara anggota East Asia Summit (EAS)”. (ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development Goals, 2012)

ASEAN juga mengeluarkan program bernama Complementarities Initiative yang mencoba menjembatani kesamaan visi antara ASEAN Community Vision 2025 (ASEAN Vision 2025) dan United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda), yang diadopsi pada waktu yang berdekatan

(UNESCAP, 2017). Dengan inisiasinya, ASEAN menjembatani agenda nasional, kawasan dan global untuk mencapai ASEAN Community yang inklusif, people-centered dan people-oriented. Inisiasi ini juga mencerminkan kerja sama triangular antara ASEAN dan PBB yang berorientasi keuntungan berkelanjutan untuk para negara anggota ASEAN. Laporan ini merupakan laporan pertama dari organisasi regional yang berkomitmen untuk menjembatani usaha integrasi regional dan kawasan untuk mencapai SDGs, dengan adanya kerangka kerja konseptual dan analitis berdasarkan nilai prinsip dan area prioritas. Terdapat lima area yang tercantum pada laporan tersebut yaitu (1) penghapusan kemiskinan; (2) infrastruktur dan konektivitas; (3) manajemen berkelanjutan atas sumber daya alam; (4) produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan (5) resilience. Kerangka kerja yang dibuat dalam inisiasi tersebut mencakup beberapa kesamaan yang ada diantara ASEAN Vision SDGs, yaitu:

1. *People-centred,*
2. *Inclusive,*
3. *Sustainable,*
4. *Resilient,*
5. *Dynamic and innovative,*
6. *Built around peace, stability and justice,*
7. *Partnership based.* (UNESCAP, 2018)

Meski begitu, dengan segala usaha yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyukseskan SDGs, UNESCAP menyatakan bahwa wilayah Asia Pasifik mungkin tidak akan mencapai 17 target tersebut dalam 2030 jika masih berkaca pada perkembangan saat ini. Sebagian besar poin SDGs tersebut justru bergerak mundur. Namun, ASEAN memimpin dalam beberapa poin-poin SDGs seperti SDGs 4: Quality Education. (The ASEAN Post, 2017)

Dengan adanya kendala bagi ASEAN dalam mengimplementasikan SDGs dengan tujuan merealisasikan ASEAN Community-nya, penulis akan menganalisis usaha implementasi agenda pembangunan dunia kedalam kawasan Asia Tenggara.

Implementasi SDGs di ASEAN membutuhkan suatu kolaborasi dan bentuk Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular bisa menjembatani implementasi SDGs tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Barkin (2013: 29), terdapat dua pendekatan umum dalam mempelajari organisasi internasional; (1) pendekatan rezim, dan (2) pendekatan institusi. Dalam artikel ini penulis akan menggunakan pendekatan institusi yang melihat apa didalam organisasi internasional tersebut, seperti struktur formal, birokrasi dan hirarkinya. Awal dari analisis pendekatan ini dapat melihat piagam dari organisasi tersebut, atau juga seringkali berbentuk trakta. Piagam tersebut mencantumkan secara spesifik apa dan mengapa organisasi itu ada, nomenklatur, negara atau aktor apa saja yang menjadi anggota dari organisasi tersebut, struktur birokrasi, dan apa saja kewenangan yang dimilikinya. Piagam organisasi internasional seringkali mencantumkan prosedur pengambilan keputusan serta strukturnya (Archer, 2001).

METODE RISET

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yang dijalankan oleh peneliti berpedoman pada pemaparan metode kualitatif oleh John W. Creswell dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular

Perkembangan kerja sama negara Asia-Afrika diawali secara resmi dengan Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada 18-24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini juga dikenal dengan Konferensi Bandung. Menurut Acharya (2016), Konferensi Bandung merupakan peristiwa yang penting dalam

menganalisis perkembangan Hubungan Internasional. (Acharya, 2016)

Pada saat diadakannya Konferensi Asia Afrika ini, sebagian negara-negara di dunia baru saja menghadapi kolonisasi dari negara-negara kuat. Konferensi ini mempertemukan negara-negara yang ada di Asia Afrika, yang kebanyakan merupakan negara yang baru merdeka dari campur tangan negara penjajahnya. Negara di Asia dan Afrika sebagian besar sedang berjuang untuk kemerdekaannya, karena adanya sistem kolonial yang mulai jatuh. Konferensi ini diadakan tanpa adanya campur tangan dari kekuatan luar dan juga dapat menjadi pengingat bahwa negara-negara yang sebelumnya dijajah sudah bebas, berdaulat dan independen dimana negara berhak menentukan nasibnya sendiri (Silas Emovwodo, 2019). Konferensi Bandung merupakan puncak dari perjuangan revolusioner yang melawan penjajahan maupun opresi (Lay, 2016).

Konferensi Bandung merupakan respon terhadap blok yang ada pada waktu tersebut. Sebagai bentuk solidaritas antara negara di Asia dan Afrika. Ini juga menjadi cerminan bahwa negara di Asia dan Afrika dapat membuat keputusan sendiri atas negaranya yang telah berdaulat. Salah satu nilai yang dibawa dari konferensi tersebut merupakan nilai sejarah yang sama, dimana negara tersebut terjajah oleh negara Barat. (Nurhasdy, Nurika, & Yekti, 2016)

Pada saat itu, beberapa negara di Asia dan Afrika merasakan opresi dan dominasi dari negara. Guotard (1996) mengatakan bahwa Bandung merupakan bagian dari turning point sejarah dunia. Dibentuk setelah Perang Dingin, Konferensi Bandung bertujuan untuk membentuk aliansi global dalam menciptakan dan mempertahankan kedamaian dunia. (Assie-Lumumba, 2015)

Pada saat itu, terdapat 29 negara merdeka yang menghadiri konferensi ini yaitu: Afganistan, Arab Saudi, Burma (sekarang Myanmar), Ceylon (sekarang Sri Lanka), Republik Rakyat Tiongkok, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos,

Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Pakistan, Filipina, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Republik Demokratik Vietnam, Negara Vietnam (Republik Vietnam), Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman, dan Yordania. Selain itu juga terdapat Cyprus, walaupun negara tersebut belum merdeka, dan negara tersebut menjadi sponsor. Kongres Nasional Afrika juga hadir sebagai pengamat. (Acharya, 2016)

Dalam pembukaan konferensi ini, Presiden Soekarno menyatakan bahwa konferensi ini merupakan suatu titik awal dari sejarah para pemimpin negara Asia dan Afrika untuk dapat bertemu, mewakili negaranya masing-masing, dan mendiskusikan permasalahan bersama sebagai negara berdaulat. Soekarno juga menyatakan dalam pidato pembukannya bahwa konferensi ini merupakan tempat dimana delegasi dari tiap negara dapat hadir dan bersama mendapatkan kemerdekaan. Konferensi Bandung juga diadakan karena kebutuhan, bukan keinginan. Konferensi Bandung menekankan pentingnya kawasan dan interaksi diantara kawasan. Konferensi Bandung merupakan fenomena penting untuk medalami perkembangan Hubungan Internasional sebagai disiplin yang universal. (Acharya, 2016)

Konferensi Asia Afrika merupakan fenomena yang menggerakkan kekuatan sosial dan politik negara-negara Selatan, atau yang biasa disebut sebagai Global South, dan menyediakan kerangka untuk kerja sama negara-negara yang terlibat. Menurut Ali Sastroamidjojo, yang juga menjadi chair dari konferensi tersebut, dokumen yang dibuat dalam konferensi tersebut menjadi pijakan kemajuan kerja sama Asia dan Afrika. (Lay, 2016)

Dalam akhir konferensi terdapat suatu final communique yang menjabarkan arah kerja sama selanjutnya bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Dalam final communique tersebut, negara bertekad untuk membangun dan membentuk kerja sama ekonomi diantara negara Asia dan Afrika. (Silas Emovwodo, 2019).

Dokumen Communiqué yang terbentuk ini terbagi menjadi 7 bahasan, kerja sama ekonomi, kerja sama budaya, hak asasi manusia dan self-determination, permasalahan masyarakat dependen, permasalahan lainnya, dukungan perdamaian dan kerja sama dunia, serta deklarasi dukungan perdamaian dan kerja sama dunia. Pada bagian terakhir tersebut, tercantumkan 10 prinsip yang menjadi dasar dalam membangun kerja sama sebagai “negara tetangga yang baik”. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah Dasasila Bandung, yang berisi:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam Piagam PBB
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa,
3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan terhadap persoalan dalam negeri orang lain,
5. Menghormati hak-hak semua bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB,
6. (a) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar,
(b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain,
7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresif maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara,
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain dengan cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama, dan
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. (Final

Communiqué of the Asian-African conference of Bandung, 1955)

Final communiqué ini bukan hanya mendukung kerja sama teknis antar negara Asia dan Afrika, namun juga membentuk suatu kerangka bagi para partisipan untuk saling mendukung pembangunan kolektif diantara negara-negara tersebut. Adanya tujuan emansipatoris yang mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, kedaulatan negara, serta prinsip non-intervensi terhadap urusan internal suatu negara. (Engel, 2019)

Pada 2005, Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22-24 April di Jakarta dan Bandung. Peringatan ini mempunyai perbedaan signifikan dibandingkan dengan Konferensi di tahun 1955 karena banyaknya negara yang menghadiri konferensi dengan keadaan yang begitu berbeda. Acara peringatan ini juga mengundang aktor non-negara seperti aktivis dari berbagai bidang. (Dirlik, 2015)

Dalam Konferensi Bandung juga terbentuk suatu kerangka kerja sama yang bernama Kerja sama Selatan-Selatan Menurut United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC), Kerja sama Selatan-Selatan merupakan kerangka kerja kolaborasi yang luas diantara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan wilayah teknis. Fokus awal dibentuknya Kerja sama Selatan-Selatan ini merupakan adanya kerja sama politis, seperti membentuk struktur tata kelola global yang progresif dan melawan hegemoni negara tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, fokus Kerja sama Selatan-Selatan sudah bergeser kepada isu yang lebih teknis dan lebih bebas dari agenda politik (Morvaridi dan Hughes, 2019), seperti Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC). (Engel, 2019)

Perkembangan Kerja sama Selatan-Selatan akhir-akhir ini telah mengalami bentuk peningkatan volume perdagangan, arus investasi asing langsung, gerakan menuju

integrasi regional, transfer teknologi, berbagi solusi dan pakar, dan bentuk pertukaran lainnya. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan perwujudan solidaritas diantara masyarakat maupun negara Selatan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kemandirian nasional secara kolektif, serta untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs). (UNESCAP, 2018)

Agenda kerja sama Selatan-Selatan dan inisiatif kerja sama Selatan-Selatan harus ditentukan oleh negara-negara Selatan, dipandu oleh prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kepemilikan dan kemerdekaan nasional, kesetaraan, non-kondisionalitas, non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan keuntungan bersama. Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) mewujudkan harapan bahwa pembangunan mampu dilakukan oleh negara berkembang dengan negara berkembang lainnya dengan prinsip emansipatoris (Gray & Gills, 2016). Objektif dari Kerja sama Selatan-Selatan tertera pada Resolusi 33/134 Buenos Aires Plan of Action (BAPA) for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1978. Objektif tersebut yaitu:

1. mendorong kemandirian negara-negara berkembang dengan meningkatkan kapasitas kreatif mereka untuk menemukan solusi bagi masalah pembangunan mereka sesuai dengan aspirasi, nilai, dan kebutuhan spesifik mereka sendiri;
2. mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara berkembang melalui pertukaran pengalaman; penyatuan, berbagi, dan penggunaan sumber daya teknis dan lainnya; dan pengembangan kapasitas pelengkap mereka;
3. memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk mengidentifikasi dan menganalisis bersama masalah-masalah

utama pembangunan mereka dan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mengatasinya;

4. meningkatkan kuantitas dan meningkatkan kualitas kerja sama pembangunan internasional melalui pengumpulan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas sumber daya yang ditujukan untuk kerja sama tersebut;
5. menciptakan dan memperkuat kapasitas teknologi yang ada di negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kapasitas tersebut dan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk menyerap dan mengadaptasi teknologi dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan spesifik mereka;
6. meningkatkan dan meningkatkan komunikasi di antara negara-negara berkembang, yang mengarah ke kesadaran yang lebih besar tentang masalah-masalah umum dan akses yang lebih luas ke pengetahuan dan pengalaman yang tersedia serta penciptaan pengetahuan baru dalam menangani masalah-masalah pembangunan;
7. mengenali dan menanggapi masalah dan persyaratan dari negara-negara yang paling tidak berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan, negara-negara berkembang pulau kecil dan negara-negara yang paling parah terkena dampak, misalnya, bencana alam dan krisis lainnya; dan
8. memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi internasional dan memperluas kerja sama internasional untuk pembangunan. (UNOSSC, 2018)

Di dalam dokumen South-South Cooperation in Asia and the Pacific – A brief overview (2018), UNESCAP membagi 4 momen signifikan dalam perkembangan Kerja sama Selatan-Selatan. Yang pertama ialah

Konferensi Bandung 1955, dimana kerangka ini lahir untuk menolong negara partisipan meraih kemerdekaan baik secara politik maupun ekonomi. Momen itu juga berdekatan dengan adanya organisasi-organisasi internasional baru seperti PBB, Bank Dunia (saat itu bernama International Bank for Reconstruction and Development), International Monetary Fund (IMF) dan General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT). Peran organisasi internasional direfleksikan dalam final communique Konferensi Bandung. Adanya pendampingan teknis diantara negara-negara Selatan dalam bentuk ahli, pelatihan, pertukaran maupun riset merupakan inti dari dokumen tersebut. (UNESCAP, 2018)

Momen signifikan kedua merupakan pengesahan badan komisi ekonomi kawasan PBB, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan munculnya Group of 77 (G-77) di sesi pertama UNCTAD pada 1964. G77 merupakan koalisi negara berkembang (yang merepresentasikan negara Selatan) terbesar untuk mendukung kepentingan ekonomi kolektif dan posisi negosiasi di PBB. Selain itu juga adanya pengesahan Economic Comission for Asia and far East pada 1947, Economic Comission for Latin America pada 1948, serta Economic Comission for Africa pada 1958. Badan komisi ekonomi kawasan ini memiliki peran penting dalam mempertemukan negara-negara untuk mendukung adanya dialog mengenai kebijakan secara multilateral, bertukar pengetahuan, serta menambah jaringan bagi negara-negara Selatan. (UNESCAP, 2018)

Momen signifikan ketiga merupakan institusionalisasi Kerja sama Selatan-Selatan oleh PBB dalam level global. Resolusi Majelis Umum A/3251 pada 1974 menciptakan badan spesial dalam mempromosikan kerja sama teknis diantara negara berkembang, Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC), yang terus berkembang menjadi UNOSSC. Pada 18 September 1978, TCDC mengadakan konferensi pertamanya yang

didedikasikan untuk negara Selatan di Argentina. Konferensi tersebut mengadopsi Buenos Aires Plan of Action (BAPA) for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC). Secara administratif, BAPA dapat menyediakan kerangka untuk adanya perubahan dalam pendampingan pembangunan (UNDP, 1978: 3). BAPA fokus pada peningkatan kerja sama ekonomi melalui kerja sama teknis, transfer teknologi, dan berbagi pengetahuan di antara negara-negara Selatan. BAPA juga menetapkan serangkaian rekomendasi baru dan konkret yang bertujuan untuk membangun kerangka hukum dan mekanisme pembiayaan di tingkat nasional, regional, antar-wilayah, dan global. BAPA mendefinisikan Kerja sama Selatan-Selatan sebagai instrumen yang mampu mempromosikan pertukaran pengalaman yang sukses di antara negara-negara yang berbagi latar belakang historis yang sama dengan tantangan serupa. Pada tahun 1980, Majelis Umum PBB membentuk High-Level Committee on South-South Cooperation untuk meninjau dan menilai implementasi BAPA setiap dua tahun. (UNESCAP, 2018)

Pada 1989, di pertemuan Gerakan Non-Blok, juga diresmikan pembuatan Group for South-South Consultation and Coordination (G-15). G-15 mendukung kerja sama bilateral Kerja sama Selatan-Selatan dengan menyediakan masukan untuk mempengaruhi kebijakan organisasi internasional yang ada seperti WTO atau G-7. Perkembangan ini berujung kepada meningkatnya ketertarikan dalam Kerja sama Selatan-Selatan sebagai instrumen untuk mempromosikan sistem baru dalam partisipasi dan pertukaran antar negara berkembang. Kerangka kerja sama ini bukan hanya mendukung tujuan pembangunan di negara berkembang, namun juga mendorong peningkatan partisipasi negara-negara tersebut dalam struktur hubungan internasional. (Research and Information System for Developing Countries, 2020)

Dengan adopsi UN Millenium Declaration pada tahun 2000, termasuk delapan Millenium Development Goals (MDGs), fokus kerja sama Selatan-Selatan mengarah kepada pengurangan kemiskinan. Namun, implementasi MDGs tidak sepenuhnya menggunakan potensi kerja sama Selatan-Selatan. (UNESCAP, 2018)

Setelah itu, istilah Kerja sama Selatan-Selatan lebih dikenal dengan adanya resolusi PBB No 58/220 di tahun 2003 mengenai High Level Committee on South-South Cooperation. Setelah itu, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai hari PBB untuk Kerja sama Selatan-Selatan. (CEACoS, 2010) (Apresian, 2016)

Momen signifikan yang terakhir yaitu munculnya aktor-aktor kerja sama pembangunan baru dan donor dari negara Selatan, yang perannya lebih ditekankan setelah krisis ekonomi global pada tahun 2008. Di periode ini juga munculnya negara berpendapatan menengah sebagai penyedia teknologi dan pengetahuan. Pendirian New Development Bank (sebelumnya disebut sebagai BRICS Development Bank) diikuti dengan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah menawarkan alternatif dari bank pembangunan multilateral yang ada, yang melayani kebutuhan pembangunan Selatan. Kerja sama Selatan-Selatan menarik minat baru dan perhatian dari komunitas kerja sama pembangunan internasional sebagai model 'baru' dari kerja sama internasional yang menggabungkan pendanaan serta pengetahuan, keahlian dan transfer teknologi antara negara-negara Selatan secara bilateral atau multilateral. (UNESCAP, 2018)

Dengan adanya adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 oleh Majelis Umum PBB pada September 2015 dan kerangka kerja pembangunan lainnya, Kerja sama Selatan-Selatan menerima dorongan baru. Kerja sama Selatan-Selatan diakui sebagai elemen penting dari kerja sama pembangunan internasional dan salah satu modalitas utama untuk mendukung

implementasi SDGs. Kemajuannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerja sama Utara-Selatan, tetapi sebagai pelengkap. Upaya untuk mengimplementasikan SDGs harus merangsang eksplorasi modalitas baru, pengaturan dan kemitraan untuk kolaborasi internasional, termasuk melalui Selatan-Selatan dan Triangular. (UNESCAP, 2018)

Pada resolusi 71/318 dan 71/244, Majelis Umum PBB memberikan mandat kepada Sekretariat PBB untuk mengadakan High-level United Nations Conference on South-South cooperation dalam rangka peringatan 40 tahun BAPA yang membahas peran Kerja sama Selatan-Selatan dan implementasi SDGs. Sebelum konferensi tersebut, Sekretariat PBB mengadakan pertemuan kawasan, sub-kawasan, maupun sektoral untuk berkoordinasi. Salah satu pertemuan yang diadakan yaitu Regional Consultation Meeting on South-South Cooperation for Asia and the Pacific, yang juga diadakan oleh UNESCAP, UNOSSC, dan pemerintah Thailand pada 27-29 Juni 2018. Pertemuan tersebut menyediakan forum informal bagi para partisipan untuk meninjau kembali Kerja sama Selatan-Selatan, serta tantangan dan peluangnya dalam mendukung SDGs. (UNESCAP, 2020)

Pada 2009 terdapat konferensi yang terletak di markas PBB Nairobi, yang dipimpin oleh Kenya. Konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan keuntungan dalam mendukung antar negara berkembang, serta juga untuk terus mendukung proses pembangunan melalui Kerja sama Triangular. Konferensi ini juga meninjau ulang perjalanan 30 tahun setelah UN-TCDC pada 1978. Konferensi ini menghasilkan dokumen final yang disebut sebagai Nairobi Outcome Document. Adopsi dokumen ini meningkatkan kesadaran negara-negara atas meningkatnya kekuatan Kerja sama Selatan-Selatan semenjak 1978. Konferensi ini juga mengenali pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang serta hubungan yang ada di Kerja sama Triangular.

(Research and Information System for Developing Countries, 2020)

Nairobi Outcome telah menyadari potensi yang dimiliki Kerja sama Selatan-Selatan dan mengundang negara maju untuk meningkatkan partisipasinya dalam Kerja sama Triangular, terutama dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan serta pendampingan pembangunan. Menurut para pembicara dalam konferensi tersebut, dokumen ini menekankan bahwa Kerja sama Selatan-Selatan bersifat komplementer, bukan substitusi kepada Kerja sama Utara-Selatan. Dokumen ini juga mendorong negara berkembang untuk meninjau ulang efektivitas Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk mempromosikan perkembangan metodologi dan statistik dalam mendukung mekanisme koordinasi nasional. Selain itu, dokumen ini mendorong agar badan PBB untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung Kerja sama Selatan-Selatan, serta bertindak sebagai katalis untuk kerja sama dan menguatkan kapabilitas organisasi regional. Dokumen ini juga menegaskan ulang pentingnya Special Unit for South-South Cooperation yang dipimpin oleh UNDP, khususnya dalam implementasi kerangka kerja untuk kerja sama. Dengan begitu, PBB mendorong seluruh anggotanya untuk mendukung usaha kerja sama ini (Research and Information System for Developing Countries, 2020).

Menurut UNOSSC, bentuk kerja sama triangular merupakan kolaborasi di mana negara-negara donor tradisional dan organisasi multilateral memfasilitasi inisiatif Selatan-Selatan melalui penyediaan dana, pelatihan, manajemen dan sistem teknologi serta bentuk-bentuk dukungan lainnya. Bentuk kerja sama triangular ini awalnya dibentuk terpisah, namun sekarang begitu terhubung dengan Kerja sama Selatan-Selatan. (Engel, 2019)

Kerja sama Triangular merupakan bentuk kerja sama dimana terdapat dua atau lebih negara berkembang berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu negara maju ataupun organisasi multilateral untuk menjadi

fasilitator maupun pihak pendonor. ASEAN Dialogue Partner Fund dan ASEAN Fund merupakan salah satu contoh kerja sama ini, dimana negara-negara ASEAN bekerja sama dengan mitra pembangunannya seperti Australia, Jepang, maupun Uni Eropa. Kerja sama Triangular dapat menjembatani ketidakseimbangan antara negara Utara dan Selatan, serta menguatkan kerja sama dalam hubungan internasional. (UNESCAP, 2018)

Selain itu, melalui Kerja sama Triangular, penerima bantuan dari negara Selatan dapat mengambil manfaat seperti dukungan keuangan, pengetahuan, teknis maupun pengalaman dari pihak multilateral maupun negara maju. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas dalam mengatasi tantangan pembangunan nasional maupun internasional serta memperkuat kemitraan. Oleh karena itu, Kerja sama Triangular dinilai sebagai solusi yang inovatif dalam menciptakan peluang baru serta melengkapi Kerja sama Selatan-Selatan. (UNOSSC, 2018)

Menurut survei, aktor utama dalam Kerja sama Triangular adalah pemerintah atau organisasi internasional (61% dari proyek yang dilaporkan). Selain itu, terdapat akademisi dan lembaga penelitian (14%), organisasi masyarakat sipil, media dan yayasan (13%), sektor swasta (6%), dan aktor lain (5%, misalnya rumah sakit, otoritas satwa liar, kota) yang memberikan input berharga. Aktor yang terlibat dalam Kerja sama Triangular dapat menjadi fasilitator, mitra penting, maupun penerima manfaat, sebagai mana yang disampaikan dalam Policy Dialogue on Triangular Cooperation yang diadakan di Lisbon pada tahun 2013. Motivasi utama para aktor untuk terlibat dalam Kerja sama Selatan adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini memungkinkan kombinasi berbagai aset seperti keahlian khusus, teknologi, dan kedekatan budaya, sebagai cara untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh partisipan, terutama di antara negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan

serupa. (Development Assistance Committee, 2016)

Implementasi Sustainable Development Goals oleh ASEAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka kerja sama yang mencakup perdamaian dan kesejahteraan untuk masyarakat dan planet, baik sekarang maupun untuk masa depan. Pembentukan SDGs bermula dari Earth Summit pada Juni 1992 dimana lebih dari 178 negara mengadopsi suatu rencana aksi untuk membangun kemitraan global dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang bernama Agenda 21. Lalu pada September 2000 di Millennium Summit, New York, negara anggota PBB mengadopsi Millennium Declaration yang akhirnya menjadi Millennium Development Goals (MDGs). (United Nations, 2020)

Pada 2013, Majelis Umum PBB membuat suatu Open Working Group dalam merancang Sustainable Development Goals (SDGs). Lalu pada Januari 2015, Majelis Umum PBB memulai proses negosiasi mengenai agenda pembangunan setelah tahun 2015. Pada September 2015, SDGs pun diadopsi pada UN Sustainable Development Summit dengan 17 poin utamanya. Hingga saat ini, terdapat pertemuan tiap tahun bernama High-Level Political Forum on Sustainable Development sebagai tempat untuk mendiskusikan dan menkoordinasikan SDGs. (United Nations, 2020)

Salah satu aktor penting dalam menjalankan SDGs adalah salah satu badan PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP). UNDP membantu koordinasi implementasi SDGs di 170 negara melalui solusi integratif. UNDP berfokus kepada sistem, penyebab utama dan keterkaitan antar tantangan dalam membuat solusi. Dibutuhkan kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam mencapai SDGs. (UNDP, 2020)

SDGs merupakan suatu bentuk kerangka agenda pembangunan yang disahkan pada

2015 dan diharapkan akan tercapai pada tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang hanya mencakup 8 agenda, SDGs mencakup 17 agenda dengan 169 indikator yang dapat dikategorikan dalam 5 aspek besar; masyarakat (people), lingkungan (planet), kesejahteraan (prosperity), perdamaian (peace), dan kemitraan (partnership). Tujuan-tujuan yang ada di SDGs pun saling berhubungan, yang berarti keberhasilan dalam satu poin memengaruhi kesuksesan dalam poin lainnya. Poin-poin yang beragam ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara lebih holistik, dimana beberapa poin SDGs begitu berkaitan dan dapat menyelesaikan masalah dari berbagai sisi.

Menurut United Nations, tingkat kawasan merupakan jembatan utama dalam menghubungkan pekerjaan tingkat global dan tingkat negara. Tingkat regional menganalisis tren dan prioritas regional, memasukkannya ke dalam diskusi antar pemerintah di tingkat regional dan global, dan menerjemahkan mandat global ke dalam output normatif regional untuk tindakan di tingkat regional dan negara. Tingkat regional juga memprakarsai pekerjaan normatif dan analitis yang dapat menjadi public goods dalam tingkat global, regional dan negara. (United Nations, 2020)

Pada tahun 2007, para pemimpin negara anggota ASEAN mendeklarasikan aspirasinya dalam Piagam ASEAN yaitu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan untuk manfaat generasi saat ini dan masa depan, dan untuk menempatkan kesejahteraan mata pencaharian masyarakat ASEAN sebagai pusat dari proses pembangunan ASEAN Community. Hal ini menjadi pijakan awal bagi ASEAN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (ASEAN, 2007)

Pada tahun 2015, ASEAN mengeluarkan agenda bernama ASEAN Community yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2025. ASEAN Community mencakup tiga pilar komunitas, yaitu:

- 1) Komunitas Politik-Keamanan,
- 2) Komunitas Ekonomi, dan

3) Komunitas Sosial-Budaya. (ASEAN, 2015)

Peluncuran agenda ini merupakan tonggak bersejarah dan puncak dari ketahanan dan dinamika ASEAN sepanjang perjalanan hampir setengah abad, serta memberi sinyal kepada dunia seberapa jauh dan seberapa baik yang telah dicapai oleh negara-negara anggota ASEAN dalam bersatu sebagai satu komunitas. ASEAN Community memastikan bahwa tujuan pendiri ASEAN untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya tercermin pada pembangunan ekonomi dan budaya, kemajuan sosial, perdamaian dan keamanan kawasan, kolaborasi, bantuan timbal balik dalam pelatihan dan penelitian, peningkatan standar kehidupan, promosi studi Asia Tenggara dan kerja sama dengan organisasi regional dan internasional. ASEAN mengakui pentingnya memastikan keselamatan warganya dari ancaman seperti perubahan iklim, penyakit, bencana alam, dan kejahatan lintas negara, penawaran peluang baru ke kawasan dan dunia perdamaian dan stabilitas, lebih besar, lebih terbuka, dan berdasarkan aturan pasar untuk bisnis, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta mendukung pembangunan berkelanjutan. (ASEAN, 2015)

ASEAN Community menyorot prioritas kawasan serta merefleksikan visi lainnya yang dibentuk pada waktu yang berdekatan, yaitu SDGs. ASEAN mengidentifikasi adanya komplementaritas antara ASEAN Community dan SDGs, sehingga kedua agenda tersebut dapat dijalankan secara paralel. Mendukung komplementaritas antara ASEAN Community dan SDGs merupakan agenda yang menonjol dalam ASEAN. Dalam mendeklarasikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN mengenali kepentingan membuat sinergitas dan komplementaritas antara kedua agenda tersebut, seperti yang secara eksplisit tertera dalam ASEAN Vision 2025:

“...underline the complementarity of the United Nations 2030 Sustainable Development with ASEAN Community

building efforts to uplift the standards of living of our peoples.” (UNESCAP, 2017)

Negara Anggota ASEAN memulai proses politik dalam menyampaikan komplementaritas ASEAN Community dan SDGs pada Special Session of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Focusing on Sustainable Development yang diadakan di Marrkas PBB, New York, pada tanggal 24 September 2016. Pertemuan tersebut mendiskusikan cara untuk mengembangkan kontribusi ASEAN terhadap usaha regional maupun global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Disini, ASEAN Foreign Ministers menyatakan pentingnya usaha individu dan kolektif dalam mencapai ASEAN Community maupun SDGs, serta meminta dikembangkannya road map dan agenda prioritas mengenai komplementaritas ini. (UNESCAP, 2017:9)

Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri Thailand (mewakili Thailand sebagai koordinator SDGs di ASEAN), mengorganisir konsultasi mengenai 2 agenda, salah satunya mengenai dukungan atas aktivitas komplementaritas sebagai bagian dari kontribusi UNESCAP atas ASEAN-UN Plan of Action 2016-2020 (UNESCAP, 2017: 9). Dengan adanya Plan of Action ini, baik dari ASEAN maupun PBB berkomitmen untuk menguatkan kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai ASEAN Community dan SDGs, yang tercantum dengan jelas dalam poin 4.3. dalam dokumen tersebut (ASEAN & UN, 2016). Menurut Sekretaris Jenderal PBB pada pidatonya di 8th ASEAN-UN Summit 2016 di Laos, ASEAN-UN Plan of Action telah memberikan kesempatan bagi ASEAN dan PBB untuk melanjutkan komplementaritas yang ada diantara ASEAN Community dan SDGs (UNESCAP, 2017:9).

Pada 22 September 2016, telah diadakan rapat antara pemimpin ASEAN dan PBB dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang ke-71. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan yang komprehensif untuk merealisasikan Complementarities Initiative.

Pertemuan ini mengakui pentingnya dukungan komplementaritas antara ASEAN Community dan SDGs dalam Plan of Action 2016-2020 (ASEAN, 2016).

Pada pertemuan tersebut terdapat kerangka yang akhirnya menjadi acuan untuk Complementarities Initiative yang secara formal diluncurkan pada pertemuan High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the 2030 Agenda for the Sustainable Development yang diadakan pada bulan Maret 2017 di Bangkok (ASEAN, 2017). (UNESCAP, 2017: 9)

Sekretariat ASEAN mengambil langkah awal untuk melakukan pemetaan dan pencocokkan komitmen ASEAN Community dengan target SDGs dan menuangkannya kedalam Complementarities Initiative. Komplementaritas ini menempatkan visi ASEAN Community dalam visi pembangunan humanistik yang lebih luas, yaitu visi yang baik untuk manusia dan memperhatikan lingkungan. SDGs, dengan mandat globalnya, memberikan negara anggota ASEAN dukungan implementasi yang lebih luas di negaranya masing-masing. UNESCAP telah memetakan komplementaritas yang ada diantara ASEAN Community dan SDGs:

a. Komplementaritas tujuan dan objektif di antara kedua agenda.

Implementasi SDGs membutuhkan adanya kerja sama dalam level global dari seluruh negara maupun kawasan. SDGs mengakui pentingnya dimensi regional dan subregional, integrasi regional, serta interkoneksi dalam pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja regional dapat memfasilitasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan serta tindakannya dalam level nasional. Kerja sama diantara PBB dan ASEAN dinilai begitu kritis dalam mengawal berjalannya SDGs. Para pemimpin ASEAN pun juga menyatakan dalam ASEA Socio-Cultural Community Blueprint 2025 adanya keterkaitan diantara agenda pembangunan terutama SDGs, dimana ASEAN juga

memegang prinsip yang sama seperti pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

b. Komplementaritas akan nilai dan prinsip operasional, sebagai panduan perencanaan, pengambilan keputusan dan pilihan tindakan.

Prinsip-prinsip komplementaritas utama di antara dua agenda ini yaitu:

- 1) Berpusat pada masyarakat: mengutamakan masyarakat dalam visi masyarakat yang makmur,
- 2) Inklusif: tidak meninggalkan siapa pun, terutama yang rentan, dalam masyarakat berkembang,
- 3) Berkelanjutan: memberikan manfaat sosial dan ekonomi,
- 4) Tangguh dengan peningkatan kapasitas untuk merespons guncangan dan tantangan,
- 5) Dinamis dan inovatif dalam penyediaan layanan sosial dan perawatan kesehatan,
- 6) Dibangun di seputar perdamaian, stabilitas, dan keadilan di dunia yang makmur, dan
- 7) Berbasis kemitraan: berkolaborasi untuk mendukung implementasi.

c. Komplementaritas elemen operasional dan mekanisme implementasi, termasuk pengaturan institusional, alokasi sumber daya, pemantauan, dan pelaporan.

Hal ini mencakup komonalitas kerangka kerja, menghindari konflik dengan komitmen negara anggota ASEAN, tidak adanya tujuan baru, efisiensi tujuan ASEAN dengan SDGs dan mendukung implementasi nasional, sinergitas untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat, serta menyatukan kerangka kerja ASEAN Community dengan SDGs atau kerangka kerja lainnya.

d. Komplementaritas dalam area prioritas yang sama untuk menentukan tindakan apa yang perlu menjadi fokus dan menghindari adanya tindakan yang merugikan tindakan lainnya. Terdapat lima area prioritas yang sama: menghapuskan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, manajemen

berkelanjutan atas sumber daya alam, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta tangguh. (UNESCAP, 2017:9-15)

Komplementaritas ASEAN Community dan SDGs sudah dapat terlihat dari dokumennya. Pertama, kedua agenda ini begitu menjunjung tujuan yang berorientasi kepada masyarakat. SDGs menekankan pada “no one will be left behind” dan ASEAN Community berkomitmen untuk membuat “One Vision, One Identity, One Community” yang memegang nilai berdasarkan peraturan (rules-based), berorientasi kepada masyarakat (people-oriented), dan berpusat pada masyarakat (people-centred). Yang kedua merupakan adanya elemen-elemen yang sama pada poin SDGs dengan pilar yang ada di ASEAN Community. Berikut merupakan tabel yang menerangkan kesamaan elemen diantara ASEAN Community dan SDGs:

Gambar 2. Kesamaan Elemen ASEAN Community dan SDGs

ASEAN Community Pillar Blueprint Elements	Aligned/ Supported SDGs
ASEAN Political Security Blueprint Elements	
A: Rules-based, people-oriented, people-centred community	16
B: Resilient community in a peaceful, secure, and stable region	16, 17
C: ASEAN Centrality in a dynamic and outward looking region	17
D: Strengthened ASEAN Institutional Capacity and Presence	17
ASEAN Economic Community Blueprint Elements	
A: A highly integrated and cohesive economy	8, 9, 17
B: A competitive, innovative, and dynamic ASEAN	9, 12, 17
C: Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation	2, 3, 4, 5, 7, 9, 17
D: A resilient, inclusive, people-oriented and people-centred ASEAN	1, 4, 5, 8, 10, 17
E: A Global ASEAN	16, 17
ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint Elements	
A: A Committed, participative, and socially-responsible community (engages and benefits the people)	1, 2, 16, 17
B: An inclusive community that promotes high quality of life, equitable access to opportunities for all and promotes and protects human rights	4, 5, 10, 16
C: A sustainable community that promotes social development and environmental protection	6, 9, 11, 12, 13, 14, 15
D: A resilient community with enhanced capacity and capability to adapt and respond to social and economic vulnerabilities, disasters, and climate change	3, 5, 8, 9, 12, 16, 17
E: A dynamic and harmonious community that is aware and proud of its identity, culture, and heritage	4, 8, 16, 17

Sumber: UNESCAP

Adanya kesamaan ini memaksimalkan keuntungan dalam implementasi dari kedua agenda pembangunan tersebut. Hal ini juga meningkatkan koordinasi antara ASEAN dan UN, yang dalam hal ini diwakili oleh UNESCAP, dalam mengimplementasikan agenda pembangunannya sebagaimana tertera dalam Plan of Action yang telah disepakati sebelumnya. (UNESCAP, 2017)

Hasil yang telah dicapai oleh Plan of Action 2016-2020 terus dievaluasi pada pertemuan-pertemuan formal antarpemerintah seperti pada ASEAN Foreign Ministers’ Meeting with The United Nations Secretary-General and The President pada pertemuan

Majelis Umum PBB yang ke-74. Pertemuan tersebut membicarakan perjalanan yang signifikan dalam Complementarities Initiative dalam beberapa aspek seperti:

- meminimalisir efek perubahan iklim,
- membangun ketangguhan dan menguatkan kerja sama untuk mengurangi resiko bencana,
- manajemen situasi darurat,
- mengurangi kemiskinan,
- mengurangi permasalahan kesenjangan,
- menguatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
- membangun institusi yang efektif untuk mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,
- mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan wanita,
- meningkatkan konektivitas infrastruktur,
- membangun kapasitas dalam kemitraan UMKM,
- mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,
- mendukung manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan,
- mencari lebih lanjut potensi kolanorasi dalam perikanan, sampah laut, kehutanan, keamanan pangan, nutrisi, dan keamanan energi, dan
- meningkatkan perlindungan sosial dan mendukung pekerjaan yang layak untuk semua. (ASEAN Secretariat News, 2019)

ASEAN juga menempatkan agenda SDGs sebagai salah satu prioritasnya dalam dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang diluncurkan pada. Dokumen tersebut menyebutkan keselarasan target SDGs dengan ASEAN Community dan visi East Asia Summit (EAS). Pencantuman SDGs dalam prioritas ASEAN akan menjadi kontribusi yang signifikan dari kawasan kepada komunitas global. AOIP juga mencantumkan dan mendukung kerja sama dengan ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDDSD) dengan institusi lain yang relevan. (ASEAN, 2019)

Pada 35th ASEAN Summit yang diadakan pada 3 November 2019 di Bangkok, Thailand, para pemimpin ASEAN meresmikan peluncuran ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDSD) yang berlokasi di Thailand. Adanya tempat ini merupakan tindakan lanjut dari ASEAN Leaders' Vision Statement on Partnership for Sustainability yang diadopsi pada ASEAN Summit sebelumnya di tahun 2019. Adanya institusi ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan prioritas strategis ASEAN dan ACSDSD akan memegang peran katalis dalam mendukung kerja sama pembangunan berkelanjutan dalam kawasan dan memperkuat komplementaritas yang ada diantara ASEAN Community dan SDGs. Institusi tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari komitmen ASEAN untuk terus melakukan riset serta untuk terus melakukan kerja sama dan dialog mengenai proyek konkret atas implementasi SDGs. (ASEAN, 2019)

SDGs memiliki begitu banyak poin dan indikator yang beragam. Mencari komplementaritas terhadap ASEAN Community dapat memudahkan adanya pengawasan atas berjalannya SDGs, karena struktur institusi ASEAN saat ini terbagi berdasarkan ASEAN Community (Gambar 1.2). Perlu adanya mekanisme koordinasi institusi yang baik diantara masing-masing bagian pilar Komunitas (Olsen, Teoh, & Miyazawa, 2015, pp. 59-77).

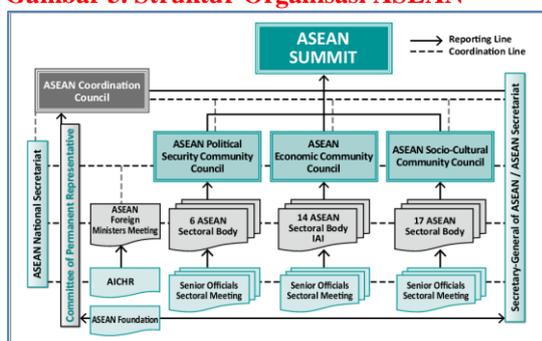
Pembentukan ACSDSD juga dapat membantu ASEAN dalam mengumpulkan informasi, data, dan riset lebih lanjut terkait pelaksanaan SDGs di ASEAN. Peran utama dari institusi ini yaitu untuk menginterpretasikan mandat komplementaritas dari ASEAN Community dan memobilisasi sumber daya untuk implementasi, membangun kapasitas, serta mendukung negara anggota ASEAN untuk memaksimalkan kesempatan dibawah kerangka kerja ASEAN dan UN (UNESCAP, 2017). Dalam tingkat ini, ASEAN telah menjadi aktor dalam pelaksanaan SDGs dalam sistem internasional. ASEAN telah memiliki kerangkanya sendiri dalam mencapai tujuannya (Archer, 2001). Tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Piagam ASEAN ditindaklanjuti dalam implementasi SDGs ini.

Usaha-usaha ASEAN dalam terus mempromosikan SDGs ini menunjukkan adanya political entrepreneurship yang merupakan bagian dari otoritas moral sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul International Organizations – Theories and Institutions (2013). Dengan memasukkan isu SDGs dalam kawasan secara formal dan menyesuaikannya dalam konteks ASEAN Community meningkatkan perhatian negara anggota maupun masyarakat ASEAN terhadap isu SDGs.

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Sustainable Development Goals

Menurut Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, Kerja sama Selatan-Selatan merupakan alat modalitas yang kuat untuk mencapai Sustainable Development Goals 2030 dengan lebih cepat (United Nations News, 2019). Agenda pembangunan internasional, salah satunya Sustainable Development Goals, telah menetapkan batu pijakan baru bagi komunitas internasional, khususnya PBB. PBB terus mempromosikan Kerja sama Selatan-Selatan melalui dialog antar pemerintah, keputusan kebijakan maupun program praktis. (UNESCAP, 2018: 14)

Gambar 3. Struktur Organisasi ASEAN



Sumber: Wahyuningrum, 2012

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dinilai sebagai modalitas utama dalam mencapai SDGs dan melengkapi, bukan menggantikan, Kerja sama Utara-Selatan. Adopsi SDGs dan agenda pembangunan internasional lainnya telah menetapkan tonggak baru bagi masyarakat internasional, termasuk PBB. PBB terus mendukung Kerja sama Selatan-Selatan melalui penyediaan dialog antar pemerintah untuk mengarah pada pengambilan keputusan kebijakan atas strategi dan program dalam memperdalam bentuk kerja sama ini. Salah satu badan PBB yang bernama UNOSSC, terus mendukung penyelesaian masalah kolektif melalui pemahaman konseptual Kerja sama Selatan-Selatan dalam upaya mendukung tercapainya SDGs. UNOSSC juga mendukung High-level Committee on South-South Cooperation yang terus menempatkan adopsi pendekatan Kerja sama Selatan-Selatan kepada agenda global maupun kepada sistem PBB. Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Kerja sama Selatan-Selatan, didukung oleh UNOSSC, berfungsi sebagai forum antar pemerintah utama untuk kerja sama Selatan-Selatan, sementara komisi regional menyediakan platform regional untuk penelitian dan analisis, diskusi kebijakan, dan pengembangan kapasitas, termasuk melalui kerja sama regional, di antara negara-negara Selatan. (UNESCAP, 2017)

Resolusi Majelis Umum PBB 71/244 mendesak sistem pembangunan PBB, dengan berkonsultasi dengan seluruh negara anggota, untuk semakin meningkatkan Kerja sama Selatan-Selatan dalam meningkatkan dampaknya kedalam konteks pelaksanaan SDGs. Dalam melakukan hal itu, PBB diminta untuk meningkatkan dukungannya di bidang-bidang yang terbukti efektif dalam Kerja sama Selatan-Selatan seperti pengembangan kapasitas, koordinasi kebijakan, integrasi regional, hubungan antardaerah, interkoneksi infrastruktur dan pengembangan kapasitas produktif nasional melalui pertukaran pengetahuan, serta inovasi teknologi. (UNESCAP, 2017)

UNESCAP merupakan badan PBB yang salah satunya bertugas untuk memastikan implementasi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Dalam melakukan hal tersebut, UNESCAP menyediakan mekanisme antarpemerintah yang disebut Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD). APFSD merupakan forum antarpemerintah utama untuk membahas implementasi Regional Roadmap for Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Sebagai badan PBB regional, UNESCAP menjadi koordinator dan fasilitator bagi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dengan juga bekerja sama dengan UNOSSC. Selain itu, badan PBB lain seperti UNDP, UN Environment, UNFPA, UNICEF, UNIDO, FAO maupun ILO juga berdedikasi untuk mempertahankan strategi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. (UNESCAP, 2017)

SDGs mengakui peran kritis dari Kerja sama Selatan-Selatan dalam pencapaian agendanya. Dengan UNOSSC, UNDP juga bermitra dengan South-South Global Thinkers, yang mengadakan dialog antar 200 think-tanks negara Selatan untuk menganalisa Kerja sama Selatan-Selatan dan kemitraan tersebut berakhir menghasilkan 10 studi riset. Riset tersebut dapat dijadikan data untuk membangun pengetahuan mengenai pola maupun tren Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam implementasi SDGs. (UNDP, 2019)

UNOSSC telah merilis laporan konkret tentang bagaimana Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular telah mempercepat pencapaian SDGs dalam publikasinya yang berjudul *Good Practices in SSTC for Sustainable Development Vol. 1* (2016) dan edisi keduanya pada tahun 2018. Dalam laporan tersebut terdapat praktek bentuk kerja sama ini yang melibatkan badan-badan PBB, negara anggota serta mitra pembangunan lainnya. Laporan ini menunjukkan bagaimana negara Selatan dalam berkolaborasi dengan negara Selatan lainnya untuk menyelesaikan

permasalahan dengan adanya pertukaran pengetahuan dan solidaritas. Dengan pengawasan organisasi multilateral yaitu PBB, laporan implementasi yang melibatkan banyak pihak ini menunjukkan bahwa Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular begitu mendukung Sustainable Development Goals dalam lingkup global.

ASEAN merupakan institusi yang menganut nilai dan prinsip yang sama dengan Kerja sama Selatan-Selatan, yaitu solidaritas dan kesetaraan antar negara anggota (Olsen, Teoh, & Miyazawa, 2015). ASEAN, sebagai organisasi regional yang beranggotakan 10 negara Selatan, merupakan bentuk konkret dan efektif dari Kerja sama Selatan-Selatan. ASEAN memiliki nilai dan prinsip yang sama dengan Kerja sama Selatan-Selatan yaitu manifestasi solidaritas, menghormati kedaulatan dan kesetaraan seluruh negara anggota dalam mengambil keputusan. Adanya integrasi regional untuk negara berkembang dalam ASEAN juga merupakan bentuk dari Kerja sama Selatan-Selatan. (Thailand & ASEAN & UNOSSC, 2018)

ASEAN merupakan institusi Kerja sama Selatan-Selatan yang berdasarkan pada solidaritas dan kesetaraan diantara negara anggotanya. Kerja sama kawasan yang telah dibentuk diantara negara berkembang seperti ASEAN merupakan “kendaraan” bagi Kerja sama Selatan-Selatan untuk menerjemahkan visinya menjadi realitas dengan adanya tujuan yang sama. Prinsip Kerja sama Selatan-Selatan juga tercantum dalam Piagam ASEAN, yaitu untuk menghormati kedaulatan dan diversitas, non-intervensi, serta komitmen dan tanggungjawab kolektif untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan kawasan. (Kementerian Luar Negeri Thailand, 2018)

Dalam pelaksanaannya, ASEAN juga telah menjadi aktor utama dalam penggunaan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Peran organisasi internasional dalam pembangunan diantara negara Selatan sebagai pendamping teknis merupakan salah satu refleksi yang penting dari dokumen awal Konferensi

Bandung, yang merupakan cikal bakal bentuk Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. (UNESCAP, 2017)

Begitu banyak bentuk kerja sama dibawah pengawasan ASEAN yang merefleksikan nilai dari Kerja sama Selatan-Selatan, karena pada dasarnya seluruh negara ASEAN merupakan negara Selatan. Salah satu kerja sama yang berada dibawah pengawasan ASEAN yaitu Complementarities Initiative. Salah satu usaha ASEAN dalam mengimplementasikan SDGs ini merupakan instrumen penting dalam menghubungkan kemitraan regional dan global, serta menggambarkan usaha dan pencapaian ASEAN dalam menjembatani agenda nasional, regional dan global. Inisiasi ini juga mencerminkan Kerja sama Triangular dimana kolaborasi antara ASEAN dan PBB dapat menguntungkan negara-negara anggota ASEAN. (Thailand & ASEAN & UNOSSC, 2018)

ASEAN begitu terpengaruh oleh cikal bakal Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, yaitu Konferensi Asia-Afrika atau Konferensi Bandung. Konferensi Bandung dapat dikatakan membentuk arah untuk regionalisme Asia, yang hingga saat ini menjadi begitu terpusat kepada ASEAN yang dibentuk pada 1967. Aspek informal, intrapersonal dan konsensus dalam interaksi para pemimpin di Konferensi Bandung dapat dikatakan telah membentuk ASEAN Way. (Acharya, 2016)

Semangat solidaritas Kerja sama Selatan-Selatan termanifestasikan dalam level regional dan pemangku kebijakannya untuk melakukan aksi kolektif dalam level sub-regional, nasional dan lokal. Institusi yang kuat diantara pemimpin negara anggota ASEAN dalam beberapa area memberikan ruang kepada Kerja sama Selatan-Selatan dan Kerja sama Triangular untuk berkembang bersama. (Kementerian Luar Negeri Thailand, 2018)

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN

Sebagian besar interaksi Kerja sama Selatan-Selatan terjadi dalam lingkungan regional karena kesamaan sejarah, bahasa, budaya, etnis dan kedekatan geografis. Lingkungan regional juga sangat cocok untuk kolaborasi Selatan-Selatan untuk mengatasi masalah lintas perbatasan seperti pembangunan infrastruktur, prosedur bea cukai, undang-undang migrasi, maupun perubahan iklim (United Nations, 2012). Pada dasarnya, seluruh kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN merupakan Kerja sama Selatan-Selatan. Namun, ASEAN tidak selalu menyatakannya secara jelas, salah satunya dalam implementasi SDGs ini. Padahal, dalam konteks global, implementasi SDGs oleh PBB begitu lekat dengan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. PBB pun juga telah meneruskan agenda ini sampai ke tingkat regional, yaitu ASEAN, salah satunya dengan adanya ASEAN-UN Summit. Dalam dokumen PBB yang berjudul *Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation* yang dipublikasi pada tahun 2012, PBB berkali-kali menyatakan ajakannya kepada organisasi maupun kelompok kawasan dalam membangun kemitraan yang kolaboratif demi pencapaian SDGs melalui Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. PBB mengakui pentingnya bentuk kerja sama ini sebagai modalitas pencapaian SDGs dan mengharapkan tindakan lebih lanjut dari seluruh aktor, salah satunya kelompok regional. Namun hal ini juga ditunjukkan kepada komisi regional PBB, seperti UNESCAP.

Menurut dokumen Nairobi, terdapat 2 prinsip dari Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dengan indikatornya masing-masing, yaitu:

a. Prinsip normatif

- Menghormati kedaulatan dan kepemilikan nasional,

- Kemitraan yang setara,
- Non-kondisionalitas,
- Tidak mengintervensi urusan domestik negara lain, dan
- Keuntungan yang mutual.

b. Prinsip operasional

- Transparansi dan akuntabilitas yang mutual,
- Pembangunan yang efektif,
- Koordinasi atas inisiatif yang berorientasi bukti dan hasil, dan
- Pendekatan dari berbagai pihak. (United Nations, 2012)

Berdasarkan dokumen tersebut dan wawancara, pelaksanaan KSST di ASEAN sudah memenuhi seluruh nilai prinsip normatif, dengan kesamaan nilai dan prinsip yang tercantum. Meski begitu, prinsip operasional belum dilaksanakan secara menyeluruh. ASEAN telah melaksanakan nilai-nilai ideologi politis Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, dan sedang memulai untuk mengimplementasikannya secara teknis dalam konteks SDGs. Komponen politik ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena hal ini merupakan cikal bakal dari Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular.

Secara teknis, Kerja sama Triangular terjadi ketika kedua negara Selatan, atau lebih, bekerja sama dengan negara Utara ataupun organisasi multilateral sebagai pihak ketiganya. Pihak ketiga, dalam konteks ini, membantu kerja sama negara Selatan tersebut melalui berbagai hal; pendanaan, pemberian tenaga ahli maupun riset. Seperti yang dikatakan dalam pertemuan OECD yang bertema *Triangular Co-Operation: Promoting to Implement The Sustainable Development Goals* pada 19 Mei 2016, para pemimpin menyoroti pentingnya kemitraan antara pihak-pihak untuk mencapai SDGs. Dalam melakukannya, para pihak yang terlibat dapat melakukan Kerja sama Triangular dalam bentuk interaksi antar pemerintah atau juga dengan organisasi internasional. Dalam level operasional, terdapat 6 kata kunci untuk

menggambarkan kesuksesan Kerja sama Triangular:

- Hubungan timbal balik antara pihak-pihak mitra,
- Komitmen dalam level teknis dan politis,
- Penggunaan sumber daya, seperti tenaga ahli maupun pembiayaan, dengan kolaboratif,
- Komitmen dan perencanaan jangka panjang,
- Komunikasi dan struktur kepengurusan yang jelas, dan
- Inovasi dan saling berkreasi untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. (OECD, 2016)

PBB juga mengeluarkan indikator mengenai kinerja regional dalam Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam berjudul *Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation* (2012). Terdapat 3 indikator dengan spesifikasi peran tim regionalnya, yaitu:

a. Formulasi kebijakan dan strategi

Peran komisi regional yaitu:

- Mendukung perumusan dan implementasi kerangka kerja, perjanjian, perjanjian dan rencana aksi untuk integrasi subregional, regional dan antar regional melalui Kerja sama Selatan-Selatan,
- Menggunakan pertemuan tahunan mekanisme koordinasi regional sebagai alat untuk memajukan kerja sama sistem dan koordinasi dalam mendukung tujuan pembangunan melalui Kerja sama Selatan-Selatan,
- Memiliki titik fokus yang mapan dan berfungsi, bagian dari portofolio yang didedikasikan untuk mempromosikan pertukaran Selatan-Selatan dan segitiga dan aksi kolektif di tingkat subregional, regional dan antarregional, dan
- Secara aktif mengadvokasi dan mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan di tingkat regional dan antardaerah.

b. *Peer-to-peer learning*, pembangunan kapasitas dan aksi kolektif

Peran komisi regional yaitu:

- Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hubungan intra dan interregional antara organisasi subregional dan regional dengan minat, mandat dan kapasitas pelengkap yang serupa,
- Bekerja dengan lembaga-lembaga regional untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah pembangunan yang memiliki cakupan antardaerah dan memiliki dimensi kerja sama Selatan-Selatan,
- Mendorong pengembangan program bersama di antara organisasi subregional, regional dan antarregional, dan
- Mengidentifikasi aset dan kesenjangan kapasitas atau kebutuhan di tingkat regional dan antardaerah di mana pengaturan kolaboratif baru dapat dikembangkan.

c. Pembagian informasi dan meningkatkan kesadaran

- Menyiapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan dan memasukkan bagian dalam laporan tahunan tentang kontribusi negara-negara terhadap kerja sama Selatan-Selatan, termasuk mengenai masalah tematis secara berkala,
- Melakukan evaluasi fungsi kerja sama Selatan-Selatan dalam organisasi regional, lembaga dan pengaturan, dan kapasitas mereka untuk mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan,
- Mendukung pembentukan kerangka kerja bersama untuk kelompok negara untuk mempromosikan tindakan nyata dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan bersama,
- Bekerja dengan masing-masing tim negara PBB dalam mengembangkan program operasional khusus negara sesuai dengan prioritas masing-masing negara dan sarana yang mereka miliki untuk

- berkontribusi dalam pemecahan masalah kolektif,
- Memfasilitasi interaksi terkait pembangunan di antara organisasi/lembaga publik dan swasta di negara berkembang untuk mengidentifikasi, bernegosiasi, merumuskan, dan melaksanakan proyek dan program bersama yang disepakati bersama,
 - Memfasilitasi identifikasi dan berbagi praktik baik dan masukan dari para ahli di dalam dan di seluruh wilayah,
 - Mendukung penciptaan jaringan pakar teknis dan lembaga yang memfasilitasi pertukaran praktik-praktik baik dan rantai pasokan pengembangan keterampilan, dan
 - Mendukung perumusan program regional dan rencana aksi untuk implementasinya.

Jika dilihat dari dokumennya, ketiga indikator tersebut dilakukan oleh komisi atau tim regional, yang merujuk kepada badan regional PBB. Namun, ASEAN sebagai organisasi regional telah melakukan sebagian langkah-langkah yang tercantum diatas dalam melaksanakan SDGs di kawasannya melalui Plan of Action, Complementarities Initiative, pembangunan ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue, dan pembangunan kesadaran atas SDGs dalam lingkup ASEAN. Namun, ASEAN belum melakukan langkah lainnya seperti adanya program dengan kawasan lain.

Secara global, SDGs telah mencerminkan bentuk Kerja sama Triangular dengan adanya pendanaan dari PBB, khususnya UNDP. Namun, ASEAN sebagai aktor belum melakukan hal-hal tersebut. ASEAN belum dapat dikatakan sebagai pihak ketiga di Kerja sama Triangular dalam konteks implementasi SDGs di ASEAN. Implementasi SDGs oleh ASEAN dapat diklasifikasikan sebagai Kerja sama Triangular ketika ASEAN memberikan bantuan merupakan dana maupun ahli dan memfasilitasi kerja sama diantara dua negara

Selatan. ASEAN dapat menggunakan institusi yang telah ada, yaitu ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDD), untuk mengambil peran katalis riset dan berbagi pengetahuan, dan mendukung adanya dialog ASEAN dengan pihak lainnya. ASEAN juga dapat memanfaatkan mekanisme yang telah dimiliki seperti RCEP maupun ASEAN Dialogue Partners untuk berkoordinasi mengenai pencapaian SDGs. Mempertemukan negara ASEAN dengan pihak eksternal, khususnya negara maju, juga dapat menciptakan bentuk Kerja sama Triangular. Melalui kerja sama triangular, para pihak yang terlibat dapat saling berbagi pengetahuan, memfasilitasi pembangunan kapasitas, serta berkolaborasi untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Penyatuan usaha berdasarkan komplementaritas pengetahuan dapat membantu pencapaian SDGs. (OECD, 2016)

ASEAN juga dapat bertindak sebagai fasilitator dalam mempertemukan negara-negara anggota ASEAN untuk membicarakan mengenai Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam mengimplementasikan SDGs. Menurut wawancara, peran fasilitator ini penting karena implementasi SDGs ini akan kembali lagi ke level negara di ASEAN. Mandat ASEAN yang tidak dapat mengintervensi urusan negara, dan negara di ASEAN memiliki kedaulatan atas negaranya sendiri. ASEAN dapat menjadi organisasi yang membawa agenda kedalam organisasi tersebut untuk dijalankan oleh negara-negara anggotanya karena Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular begitu teknis dan tergantung kepada kondisi di masing-masing negara. Beberapa negara juga melakukan Kerja sama Selatan-Selatan tanpa melakukan Kerja sama Triangular, karena kerja sama tersebut dilakukan secara bilateral.

Dalam konteks SDGs di ASEAN, keberadaan Complementarities Initiative menggambarkan usaha dan pencapaian ASEAN dalam menjembatani agenda global, regional dan nasional untuk mencapai ASEAN

Community yang inklusif, berpusat kepada masyarakat dan berorientasi kepada masyarakat tanpa meninggalkan siapapun. Adanya inisiatif untuk mencari komplementaritas ini merupakan langkah awal yang baik bagi SDGs, karena ASEAN telah memasukkan agenda global tersebut kedalam kawasannya. Meski begitu, perlu adanya langkah teknis yang lebih konkret, khususnya bagi negara anggota ASEAN dalam menerjemahkan agenda ini.

Selain itu, salah satu poin SDGs juga telah menekankan pada kemitraan sebagai kunci dari pencapaian SDGs, dimana kemitraan merupakan kunci dari pencapaian SDGs dalam poin ke-17. Salah satu hal yang dicerminkan dari poin ini yaitu kemitraan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk mencapai tujuan kerja sama pembangunan.

Salah satu kesulitan dalam implementasi ini yaitu juga terdapat kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi diantara negara Selatan (UNESCAP, 2017). Dokumen Nairobi menyebutkan bahwa seluruh aktor yang mendukung inisiatif ini perlu mengumpulkan data dan informasi, maupun koordinasi dan evaluasi Kerja sama Selatan-Selatan. Meski begitu, masih terdapat kekurangan dalam informasi mengenai Kerja sama Selatan-Selatan baik dalam level nasional maupun kawasan. Hal ini juga diakui dalam dokumen Mapping South-South Cooperation in ASEAN (2018) bahwa ASEAN masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menyebarkan data, walaupun sudah ada ASEAN Community Statistical System.

KESIMPULAN

Ketika Kerja sama Selatan-Selatan pertama kali dipromosikan di Konferensi Bandung, negara berkembang telah memperoleh kemerdekaan dari kekuatan untuk membangun negaranya dengan nilai dan prinsip solidaritas antar negara Selatan. Negara-negara ini merupakan sumber penting bantuan teknis, inovasi dan pembiayaan pembangunan untuk negara-negara Selatan lainnya. Hal ini

adalah sangat penting dalam konteks SDGs, 17 poin agenda pembangunan yang dikeluarkan oleh PBB. Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular menjadi modalitas penting untuk mencapai SDGs. Dalam perkembangannya, ASEAN turut aktif dalam mengimplementasikan agenda global ini kedalam kawasannya. ASEAN sebagai aktor telah melakukan berbagai usaha dalam mewujudkan SDGs yang telah berjalan selama 5 tahun ini. Secara ideologis, ASEAN telah menjalankan usaha tersebut dengan nilai dan prinsip Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular. Namun, masih sebagian usaha-usaha teknis tersebut mewujudkan bentuk Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, yang ASEAN tidak nyatakan secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2016). Studying the Bandung conference from a Global IR perspective. *Australian Journal of International Affairs*.
- Apresian, S. R. (2016). Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global . *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. XII/02*, 189-203.
- Archer, C. (2001). International Organizations. ASEAN Secretariat, UNOSSC, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (2018). Mapping South-South Cooperation in ASEAN . Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.
- Axelrod, R. &. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *World Politics*, 38(1), 226-254.
- Assie-Lumumba, N. T. (2015). Behind and beyond Bandung: historical and forward-looking reflections on south-south cooperatoin . *Bandung: Journal of the Global South*.
- Barkin, J. S. (2013). International Organizations: Theories and Institutions.
- Cabana, S. L. (2014). *Chronology and History of South-South Cooperation* . IBERO-American Programme for The Strengthening of South-South Cooperation. Development Assistance Committee. (2016). *Triangular Cooperation - Findings from a 2015 Survey*. OECD.
- Dirlik, A. (2015). The Bandung legacy and the People's Republic of China in the

- perspective of global modernity. *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 16, No. 4, 615-630.
- Engel, S. (2019). South-South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 1-25.
- Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South-South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly*, 557-574.
- Herbert, A. L. (1996). Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas and Franck. *Berkeley Journal of International Law*.
- Lay, C. (2016). THE BANDUNG SPIRIT: Nation State and Democracy. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Volume 6, Issue 1, 1-10.
- Nurhasdy, R., Nurika, R. R., & Yekti, S. N. (2016). The Relevance of Bandung Spirit in the Contemporary Global Trade Order. *Jurnal Sospol, Vol 2 No 1*, 137-155.
- Research and Information System for Developing Countries. (2020). *Chapter 2. South-South Cooperation: A Historical Perspective*. Retrieved from RIS: Research and Information System for Developing Countries: http://ris.org.in/sites/default/files/Chapter%202_0.pdf
- Parker, C. F., & Karlsson, C. (2013). Leadership and International Cooperation.
- Safonov, G. V., & Piskulova, N. A. (2018). Sustainable development and international cooperation.
- The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2018). South-South Cooperation in Asia and the Pacific – A brief overview. UNESCAP.
- UNESCAP, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Secretariat of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2017). Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for Action. Thailand.
- UNESCAP. (2020). *Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and the Pacific*. Retrieved from UNESCAP: <https://www.unescap.org/events/regional-south-south-cooperation>
- United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). (2018). Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development - Volume 1&2.
- United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). (2019). South-South in Action: South-South and Triangular Cooperation on Peace and Development.

BIOGRAFI

Hanifa Zama Dinnata merupakan alumni Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji tentang kerja sama internasional dan organisasi internasional.

Nuraeni merupakan pengajar dalam departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang mendalami mengenai Organisasi Internasional.